



LAPORAN KEGIATAN SIDANG “ON THE ROAD MEETING OF THE OECD GLOBAL PARLIAMENTARY NETWORK”

30 June & 1 July
2022



OECD GLOBAL
PARLIAMENTARY
NETWORK

Saeima
Riga, Latvia





LAPORAN KUNJUNGAN DELEGASI DPR RI
MENGHADIRI PERTEMUAN
“ON THE ROAD MEETING OF THE OECD GLOBAL
PARLIAMENTARY NETWORK”

Di Riga – Latvia

30 Juni – 1 Juli 2022

I. PENDAHULUAN

Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, yang dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (FP-Gerindra) dan didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana, M.B.A (FP-Demokrat) dan Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M (F-PDIP), dan anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaST (F-PDIP) dan Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons), M.Eng.SC. (F-Nasdem) menghadiri pertemuan "*On the Road Meeting of the OECD Global Parliamentary Network*".

Pertemuan dilaksanakan secara langsung di Riga, Latvia, tepatnya di Gedung Parlemen Latvia (Saeima of the Republic of Latvia) pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022.

II. AGENDA ACARA

NO	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	Selasa, 28 Juni 2022		
	19.00	Berkumpul di Bandara Soeta	Terminal 3
	21.05	Take off menuju Istanbul	By Tk 57
2.	Rabu, 29 Juni 2022		
	05.05	Tiba di Istanbul	
	08.25	Take off menuju Riga, Latvia	By TK1757
	11.45	Tiba di Riga, Latvia	
	14.00	Check in Hotel	Pullman Riga Old Town
	14.00 - 15.00	Makan Siang	tbc
	15.00 - 18.00	Berkunjung ke Museum Riga	Penyerahan patung untuk koleksi Museum Riga
	19.00 – 20.00	Makan malam	Tbc
3.	Kamis, 30 Juni 2022		
	07.00-08.00	Sarapan pagi	Restoran hotel
	09.00	Berkumpul di Lobby	
	09.00-10.00	City Tour	
	16.00	Menuju tempat sidang	Gedung Parlemen
	16.30	Welcome coffee	tbc
	17:00-19:00	Parliamentary workshop – Responding to the challenges of the digital transformation in democratic processes	
	20:00	Reception	Latvian National Museum of Art

4.	Jum'at, 1 Juli 2022	
	07.00-08.00	Sarapan Pagi
	08.30	Menuju Gedung Parlemen
	09:00-09:30	<p>Welcoming remarks</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ināra Mūrniece, Speaker of the Saeima, Latvia (tbc) • Rihards Kols, Chairman, Foreign Affairs Committee, Saeima of the Republic of Latvia • Artūrs Toms Plešs, Minister for Environmental Protection and Regional Development, Latvia (tbc) • Anthony Gooch, Director for Public Affairs and Communications, OECD and Chair, OECD Global Parliamentary Network
	09:30-11:00	Safe digital spaces: data governance to enhance access and sharing
	11:00-11:30	Coffee break
	11:30-13:00	Governing and legislating in the digital age
	13:00-13:15	Group photo
	13:15-14:30	Lunch

	14:30-16:30	Combatting digital mis- and disinformation: view from the Eastern Front	
	16:30-18:00	Cybersecurity and digital security: managing risks and addressing vulnerabilities	
	18:00-18:15	Closing remarks and next steps	
5.	Sabtu, 2 Juli 2022		
	07.00-08.00	Sarapan pagi	
	09.00	Menuju Bandara Riga	
	12.45	Take off menuju Istanbul	By TK 1758
	15.45	Tiba di Istanbul	
6.	Minggu, 3 Juli 2022		
	02.00	Take off Menuju Jakarta	By TK 56
	17.35	Tiba di Jakarta	

III. SITUASI UMUM

A. HARI PERTAMA PERTEMUAN - 30 JUNI 2022

Sesi pertama dari pertemuan tersebut, yaitu "*Responding to the Challenges of the Digital Transformation in Democratic Process*" dibuka oleh Rihards Kols (*Chairman, Foreign Affairs Committee, Saeima of the Republic of Latvia*) dan dilanjutkan oleh presentasi dari Barbara Ubaldi (*Head of the Digital Government and Data Unit Deputy Head of the Open and Innovative Government Division Public Governance Directorate OECD*).

Dalam presentasinya, Barbara Ubaldi menjelaskan mengenai "*Governing and Legislating in Digital Age*" yang dimana mencakup aspek akses dan penggunaan data, yang dimana

dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan demokrasi dan pembuatan peraturan yang dapat dipercaya.

Selain itu, Barbara juga menjelaskan betapa pentingnya melindungi hak asasi manusia dan prinsip demokrasi yang sama secara online dan offline, termasuk memastikan akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital.

Barbara juga menjabarkan aspek Parlemen Terbuka (*Open Parliament*) yang dimana mengadopsi praktik konkret dengan penggunaan alat dan data digital untuk meningkatkan representasi, partisipasi dan transparansi dalam proses legislatif, dengan memberikan informasi tentang prosedur legislatif, agenda anggota parlemen, rapat terbuka, dan agenda parlemen anggaran, diantara yang lainnya.

Sesi yang sama juga menampilkan parliamentary panel yang dihadiri oleh anggota parlemen dari berbagai negara, termasuk DPR RI. Dalam pertemuan ini, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaST. (F-PDIP), selaku Anggota BKSAP DPR RI menyampaikan pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia digital.



Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan pandangannya pada sesi di hari pertama: "Governing and legislating in the digital age"

Irine menyampaikan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perempuan dapat memanfaatkan internet dan perangkat seluler sebagai kendaraan untuk memajukan ekonomi mereka. Sebagai contoh, dengan membuka bisnis baru dan menjual produk mereka di platform digital.

Pada kesempatan ini, Irine juga menjelaskan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan global. Tantangan-tantangan ini dapat menjadi penghalang utama bagi pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan serta kesetaraan gender.

Lebih lanjut, disampaikan juga bahwa Parlemen mempunyai peran kunci untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini, parlemen perlu meningkatkan visibilitas dan mengarusutamakan kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan dengan memastikan bahwa setiap undang-undang ataupun kebijakan tentang teknologi digital menargetkan lebih banyak perempuan.

B. HARI KEDUA PERTEMUAN – 01 JULI 2022

Hari kedua pertemuan "*On the Road Meeting of the OECD Global Parliamentary Network*" dibuka oleh beberapa pembicara seperti:

- Inara Murciece (*Speaker of the Saeima, Latvia*)
- Rihards Kols (*Chairman, Foreign Affairs Committee, Saeima of the Republic of Latvia*)
- Arturs Toms Pless (*Minister for Environmental Protection and Regional Development*)
- Anthony Gooch (*Chair, OECD Global Parliamentary Network*)

Setelah acara dibuka, sesi pertama dari pertemuan tanggal 01 Juli 2022 tersebut, yaitu "*Safe Digital Spaces: Data Governance to Enhance Access and Sharing*". Sesi ini menyoroti peluang dan tantangan akses dan berbagi data, dan bagaimana Rekomendasi OECD terkait *Enhancing Access to and Sharing of Data* dapat membantu pemerintah mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja tata kelola data yang koheren untuk membuka potensi manfaat data lintas sektor dan yurisdiksi.

Dalam hal ini, sesi tersebut dihadiri oleh beberapa panelis seperti Christian Reimsbach-Kounatze (*Economist, Policy Analyst, Data Governance and Privacy, OECD*). Christian memaparkan OECD Council Recommendation untuk topik *Enhancing Access to and Sharing of Data*. Dalam presentasinya, Christian menyampaikan tujuan dari rekomendasi tersebut, yaitu memfasilitasi akses dan berbagi data lintas sektor dan yurisdiksi; memungkinkan kolaborasi dan penggunaan kembali data yang inovatif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan; melindungi hak-hak pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan ekosistem data; dan membina koherensi kerangka tata kelola data lintas sektor dan yurisdiksi.

Selain itu, Christian juga menjabarkan pentingnya data sebagai input untuk produksi, dan data yang sama dapat menjadi input untuk berbagai tujuan. Selain itu, akses dan berbagi data yang tepat waktu, aman, dan andal sangat penting untuk respons dan penelitian COVID-19 yang efektif, dan dapat memajukan pencapaian SDGs.

Pada sesi kedua pertemuan hari kedua tersebut, bertema “*Governing and Legislating in Digital Age*”, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., memberikan pandangannya sebagai discussant. Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, termasuk internet mendorong Parlemen untuk menggunakan teknologi dalam menjalankan tugasnya dan untuk lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon menyampaikan pandangannya pada sesi kedua “Governing and Legislating in Digital Age”

Lebih lanjut, Dr. Fadli Zon menjelaskan bahwa DPR RI telah mengimplementasikan sistem Open Parliament yang dimana rencana aksi nasionalnya mendorong ketersediaan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SILEG), yang dimana masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses informasi rancangan undang-undang (RUU) dan menyampaikan aspirasinya secara online.

Pada kesempatan ini Dr. Fadli Zon juga menyampaikan usulan bagi Parlemen untuk meregulasi aktivitas online yang dilakukan oleh perusahaan termasuk platform e-commerce dan UMKM; dan juga memastikan digital inclusion dengan menjembatani kesenjangan digital secara global.

Pada sesi ketiga “*Combating Digital Mis-and Disinformation*” Molly Leshner (Senior Policy Analyst, Going Digital, Digital Economy Policy Division, OECD), menjadi salah satu panelis, yang menjelaskan bahwa akses ke informasi yang akurat sangatlah penting untuk memenuhi hak-hak dasar, termasuk kebebasan berbicara atau berekspresi, dan hak untuk mengakses informasi, contohnya mengenai perubahan iklim.

Sebagai tambahan, para delegasi juga diberikan akses untuk melihat sebuah *Toolkit* untuk memecahkan isu atau masalah disinformasi yang berjudul “*Disentangling Untruths Online: Creators, Spreaders and How to Stop Them*”, dan juga podcast terkait disinformasi.

Pada sesi ketiga, Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, M.B.A (FP-Demokrat) juga menyampaikan pandangannya. Wakil Ketua BKSAP tersebut menyampaikan bahwa sangat penting untuk melawan misinformasi dan disinformasi, akan tetapi kebijakan untuk melawannya tersebut harus sesuai dengan standar dan prinsip HAM.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan pandangannya pada sesi ketiga “*Combatting Digital Mis-and*”

Pada kesempatan yang sama, Putu Supadma Rudana juga memberikan usulan bahwa penting pemerintah seluruh negara untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berbasis bukti dan fakta, dan juga kredibel.

Sesi terakhir pada pertemuan hari kedua tersebut, yaitu “*Cybersecurity and Digital Security: Managing Risks and Addressing Vulnerabilities*”, menyoroti bagaimana memperkuat keamanan dan kepercayaan, tanpa menghambat manfaat transformasi digital dan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan, inovasi, dan pertumbuhan. Sesi ini berfokus pada aspek ekonomi dan sosial dari keamanan siber, dibandingkan

dengan aspek yang murni teknis, yang terkait langsung dengan penegakan hukum pidana atau keamanan nasional. Ini menyoroti secara khusus pentingnya manajemen risiko keamanan digital sebagai karakteristik utama dari pendekatan OECD terhadap keamanan digital dengan fokus pada meningkatkan keamanan produk dan layanan.

Pada sesi terakhir tersebut, Christian Reimsbach-Kounatze (Economist, Policy Analyst, Data Governance and Privacy, OECD) memaparkan presentasinya mengenai “*OECD Work on Digital Security Policy*”, yang dimana OECD telah menerbitkan dua laporan pada Februari 2021, yaitu “*Understanding the Digital Security of Products: An In-Depth Analysis*” dan “*Understanding the Digital Security of Products: A Policy Discussion*”.

Dalam paparannya, Christian menjelaskan bahwa keamanan digital adalah tantangan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, pengaturan strategi keamanan digital nasional kerangka kelembagaan untuk mengelola risiko keamanan digital diperlukan, diantara lainnya, termasuk:

- Koordinasi pemerintah yang lebih baik di tingkat kebijakan dan operasional, yang dimana tanggung jawab untuk pembuatan dan implementasi kebijakan keamanan siber secara jelas ditugaskan di dalam pemerintah.
- Kerjasama publik-swasta yang diperkuat: Mengakui bahwa dunia maya sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh sektor swasta dan bahwa pengguna juga memainkan peran kunci.
- Peningkatan kerjasama internasional: Mencerminkan kebutuhan akan aliansi dan kemitraan yang lebih baik dengan negara atau sekutu yang berpikiran sama, termasuk memfasilitasi pembangunan kapasitas negara-negara kurang berkembang.
- Menghormati nilai-nilai fundamental: Penekanan kuat pada perlunya kebijakan keamanan siber untuk menghormati nilai-nilai fundamental, yang umumnya mencakup privasi, kebebasan berbicara, dan arus informasi yang bebas.

IV. AGENDA LAIN:

Di sela-sela kunjungan ke Riga, Latvia untuk menghadiri "On the Road Meeting of the OECD Global Parliamentary Network", delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, yang dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., dan didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana, M.B.A (FP-Demokrat) dan Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M (F-PDIP), dan Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaST (F-PDIP) dan Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons), M.Eng.SC. (F-Nasdem), mengunjungi Museum Seni Riga Bourse.

Museum Seni Riga Bourse tersebut memiliki berbagai koleksi benda seni dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa koleksi seperti kain Songket Palembang, Kain Tenun Sumba, wayang kulit, Patung Asmat, Topeng Bali dan patung garuda, pun telah dipajang di museum tersebut.

Dalam kunjungannya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, DR. Fadli Zon menyerahkan Keris, Songket Bali, Songket Palembang dan Gunungan kepada Direktur Jenderal Museum Seni Nasional Latvia, Māra Lācebenda, untuk dijadikan koleksi permanen di Museum Seni Riga Bourse.



Ketua Delegasi DPR RI Dr. Fadli Zon menyerahkan beberapa benda seni Indonesia untuk dijadikan koleksi permanen di Museum Seni Riga Bourse.

Dalam hal ini, Ketua BKSAP tersebut menyampaikan bahwa penyerahan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kerja sama budaya antar negara, akan tetapi juga untuk menabahkan wawasan bagi pengunjung museum mengenai keris dan sejarahnya.

Penyerahan keris tersebut juga saksikan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Kamapradipta Isnomo, Direktur Museum Seni Riga Bourse, DR. Daiga Upeniece, dan Konsul Kehormatan RI untuk Republik Latvia, Valdis Tigalis.



Delegasi BKSAP DPR RI berfoto Bersama di akhir acara kunjungan ke Museum Seni Riga Bourse.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pertemuan berjalan dengan lancar. Delegasi BKSAP DPR RI berperan aktif dalam memberikan intervensi di setiap sesi ataupun saat menjadi discussant.
2. Saran dan pendapat para delegasi BKSAP DPR RI dapat berkontribusi untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi antar OECD dan setiap parlemen yang hadir dalam pertemuan, dan membuka wawasan lebih untuk para anggota parlemen negara lain.
3. Delegasi BKSAP DPR RI mendapatkan *approach* baru dalam menjalankan tugasnya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, dan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada dunia digital atau online.

Jakarta, 4 Juli 2022
Ketua BKSAP DPR RI,



Dr. Fadli Zon
A-86



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



bksapdpr